**Faktor Internal dan Eksternal dalam Proses De-eskalasi Konflik ETA – Pemerintah Spanyol tahun 2006 - 2012**

**Desak Putu Sinta Suryani**

**ABSTRAK**

This paper describes the process of conflict de-escalation between ETA and Spanish government in 2006 – 2012 and the internal and external factors of the process. According to theory of “*the hourglass model of conflict resolution*” by Oliver Ramsbotham, this paper will describe the de-escalation process, related to the violence elements in conflict. The internal and external factor will be explained by the synthesis of “*de-escalation of constructive conflict*” by Louis Kriesberg and the relation between conflict and solidarity by Randall Collins. The argument is the conflict de-escalation process of ETA and Spanish government in 2006 to 2012 is still in the phase of conflict containment and now going to the phase of conflict settlement. Some changes in ETA internal organization and faction between the militants and moderates push the declining of violence in order to achieve the aim of organization. The protracted character in ETA struggle also influence the weakening of solidarity in Basque society, the decreasing of ETA resources and logistics channels and attract the sympathy of ETA victims. The fact that Basque Country is also included a region in France also results the consequences of ethnic kin support as an external factor of conflict de-escalation process, together with the role of intermediaries to support the conflict settlement in the process.

**Kata Kunci**: conflict de-escalation, ceasefire, the hourglass model of conflict resolution, conflict containment

Di antara sejumlah etnis dunia, pergerakan etnis Basque merupakan pergerakan etnis yang masih cukup eksis hingga saat ini dan melibatkan dua negara yang berbatasan secara langsung, yaitu Spanyol dan Prancis. Secara historis, masyarakat Basque (Basque: Euskaldunak, Spanyol: Vascos, Prancis: Basques) telah mendiami Benua Eropa ribuan tahun yang lalu, khususnya di wilayah Pegunungan Pyrenee yang membentang di perbatasan Spanyol dan Prancis. Etnis ini memiliki identitas yang berbeda, seperti bahasa Euskara yang termasuk dalam empat bahasa non Indo-Eropa yang ditemukan di wilayah benua Eropa, selain bahasa Finlandia, Estonia dan Hungaria (Harguindeguy & Itcaina, 2011).

Jumlah etnis Basque di seluruh dunia diperkirakan mencapai sekitar 18 juta jiwa dan 2,5 juta jiwa di antaranya mendiami kawasan Basque Country di Spanyol dan kawasan Pays Basque di Prancis. Basque Country sendiri merupakan sebuah cita-cita nasionalisme etnis Basque yang terdiri atas dua wilayah politik administratif di Spanyol; Basque Autonomous Community dan Chartered Community of Navarre dan satu wilayah French Basque Community di selatan Prancis yang terdiri atas tiga propinsi, Lapurdi, Nafarroa Beherea dan Zuberoa. Wilayah Basque Country di Prancis kemudian dikenal dengan Iparralde (*Northern Basque Country*) dan wilayah Basque Country di Spanyol sebagai Hegoalde (*Southern Basque Country*) ([www.midas-press.org](http://www.midas-press.org), 2012). Wilayah Hegoalde Spanyol kemudian menjadi pusat aktivitas nasionalisme Basque.

Keinginan membentuk Basque Country merupakan hasil dari nasionalisme Basque yang mulai tumbuh pada abad ke-19, ditandai dengan pembentukan Euzko Alderdi Jeltzalea (BNP - Basque Nationalist Party) oleh Sabino Arana (1865-1903) (Sanchez-Cuenca, 2008). Perpecahan internal BNP membuat pada tahun 1958, ETA (Euskadi Ta Askatsuna *– Basque Country and Freedom*) dibentuk oleh sebagian para pemuda dan pelajar Basque yang merasa tidak puas atas reaksi BNP terhadap tindakan represif rezim Franco di Spanyol. Kelompok ini kemudian meresmikan organisasinya pada Juli 1959 dan mendefinisikan mereka sebagai kelompok patriotik, non-religius dan non-politik dengan tujuan utama *self determination[[1]](#footnote-2)* untuk tanah kelahiran Basque.

Disetujuinya Statuta Otonomi Guernica serta Statua Otonomi di Navarre pada tahun 1979 menjadikan wilayah Hegoalde sebagai wilayah dengan tingkat *self-government* tertinggi di Eropa. Selain otonomi dalam bahasa, otonomi juga mencakup otonomi pajak dan fiskal hingga penetapan sistem pendidikan tersendiri (Idoiaga, 2006). Namun, otonomi tidak lantas membuat perjuangan kelompok ini terhenti. Kerapkali perjuangan mereka ditunjukkan aksi pengeboman dan teror, termasuk terhadap beberapa politisi Spanyol, seperti pengeboman mobil di Madrid pada tahun 1973 yang menewaskan Luis Carrero Blanco, Perdana Menteri Spanyol saat itu dan aksi teror kelompok separatis Basque yang dipimpin oleh Juan Manuel Soares yang menewaskan dua belas warga sipil Spanyol ([www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), 2011). Hal ini membuat intensitas ketegangan di antara ETA dan Pemerintah Spanyol meningkat. Berbeda dengan situasi di Hegoalde, Iparralde merupakan wilayah yang masih menjadi bagian dari department des Pyrenes Atlantiques di region Aquitaine Prancis*.* Selain itu, pemerintah Prancis pun masih menolak untuk memberikan status resmi bahasa Basque sebagai bahasa regional Iparralde (Bray, 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir, proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol mulai terjadi. De-eskalasi konflik sendiri dimaknai sebagai identifikasi berkurangnya kuantitas dan intensitas kekerasan di antara pihak-pihak konflik dan juga seringkali diikuti dengan penarikan pasukan bersenjata dan difasilitasi oleh pihak ketiga (Miller, 2005: 30). Hal ini diperlihatkan dengan pernyataan sebagian anggota ETA di Basque Autonomous Community yang kerapkali mengungkapkan keinginannya untuk melakukan dialog damai dengan Pemerintah Spanyol dan Prancis. Pada September 1998, ETA mengumumkan gencatan senjata[[2]](#footnote-3) melalui Persetujuan Lizarra-Garazi. Persetujuan ini ditandatangani oleh 23 partai nasionalis Basque, kelompok akar rumput Basque, dan kelompok sayap komunis Spanyol yang menginginkan tercapainya sebuah proses resolusi dengan menempuh negosiasi di tingkat global. Pertemuan ini kemudian tidak mencapai kata sepakat hingga pada 1999 ETA menghentikan gencatan senjatanya (Aiartza & Zabalo, 2010).

Penurunan intensitas konflik terlihat pada tahun 2003 hingga 2006, yaitu tidak adanya korban jiwa akibat aksi kekerasan ETA (Sanchez-Cuenca, 2008). Pada Maret 2006, ETA kembali mendeklarasikan gencatan senjata. Selanjutnya, aksi-aksi teror ETA masih kerap terjadi, namun jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu pada periode 1968 hingga 2003, aksi ETA pasca 2006 tergolong rendah dan targetnya cenderung bukan lagi publik, melainkan individu. Sejak awal mula dibentuk, aksi terorisme ETA telah menewaskan 800 jiwa, meninggalkan ratusan korban yang terluka, melibatkan beberapa penculikan, serta penyerangan dan ancaman dengan sebagian besar target polisi dan masyarakat Spanyol (Idoiaga, 2006). Saat ini, lebih dari 700 anggota ETA ditahan dalam penjara Prancis dan Spanyol, sebagian lagi tinggal di berbagai belahan dunia dan lepas dari proses hukum (Idoiaga, 2006).

Pada September 2010 ETA mengumumkan keinginannya untuk kembali melakukan gencatan senjata. Keinginan tersebut ditindaklanjuti ketika pada 10 Januari 2011 hingga 20 Oktober 2011, sebuah video pernyataan gencatan senjata dirilis oleh kelompok ETA yang menyatakan penghentian penggunaan kekerasan dan aksi teror yang kerap mewarnai aksi mereka. Dalam video tersebut, ETA secara jelas menyebutkan keinginannya untuk melakukan proses dialog internasional untuk menyelesaikan konflik secara damai sehingga Basque Country diakui sebagai sebuah entitas yang berbeda dari negara Spanyol dan Prancis ([www.guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk), 2011).

“Therefore, Eta has decided the definitive cessation of its armed activity. Eta calls upon the Spanish and French governments to open a process of direct dialogue with the aim of addressing the resolution of the consequences of the conflict and, thus, to overcome the armed confrontation. Thorough this historical declaration, Eta shows its clear, solid and definitive commitment.” ([www.guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk), 2011)

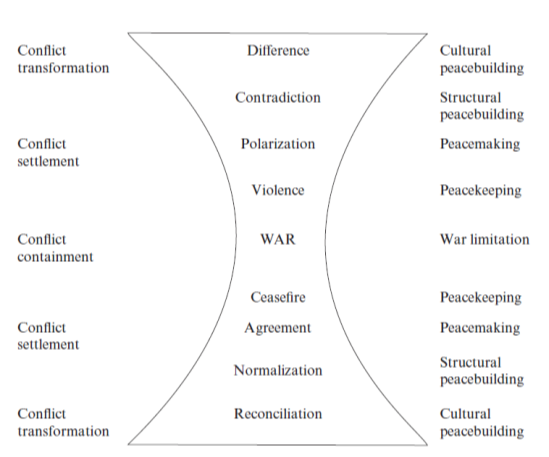
Pasca rilisan video tersebut, belum ada aksi-aksi radikal lanjutan yang dilakukan oleh ETA sehingga akhirnya mendatangkan respon dari beberapa pemimpin dunia, seperti mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, mantan PM Irlandia Bertie Ahern and mantan PM Norwegia Gro Harlem Brundtland, serta pemimpin Sinn Fein party dari Irlandia Gerry Adams, yang menggelar forum internasional untuk mendesak pemerintah Spanyol untuk merespon wacana damai ETA tersebut (Zurutuza, 2011). Desakan ini turut mengundang reaksi dari beberapa tokoh internasional, seperti Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris,

“I stand ready to help personally in any way I can. The last armed confrontation in Europe is finally over. We should all welcome this and work together to make peace irreversible.” ([www.dailymail.co.uk](http://www.dailymail.co.uk), 2011)

**Konflik dan “*The* *Hourglass Model of Conflict Resolution*”**

Sebuah konflik dapat mencapai proses de-eskalasi setelah masa transisi tertentu, ditandai dengan berkurangnya tingkat kekerasan dalam konteks konflik dan jumlah pihak-pihak yang terlibat di dalam perjuangan (Kriesberg, 1998: 182). Proses ini seringkali dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengantisipasi musuh baru dalam konflik, perjuangan dalam eskalasi konflik yang cenderung kurang efektif, dan lamanya konflik yang berlangsung sehingga adanya keinginan untuk kembali mengevaluasi tujuan perjuangan (Wall & Callister, 1999: 515). De-eskalasi konflik tidak hanya ditandai oleh beberapa momentum yang terlihat, namun juga diikuti oleh berbagai peristiwa atau tren setelahnya (Kriesberg, 1998: 190). Oleh karena itu, proses de-eskalasi konflik juga memiliki beberapa parameter dalam kaitannya dengan level perjuangan kelompok di dalam konflik, yaitu *low level escalation*, *sharp escalation*, dan proses perjuangan yang telah dilakukan dalam waktu yang panjang (*protracted struggle*) (Kriesberg, 1998: 200).

Lebih lanjut lagi, Oliver Ramsbotham Ramsbotham menyempurnakan kembali fase-fase de-eskalasi konflik ke dalam “*the hourglass model of conflict resolution*”, yang melihat bahwa proses eskalasi dan de-eskalasi dengan analogi jam pasir. *Conflict containment* merujuk pada penghentian *direct violence* dalam konflik, yaitu melalui pembatasan kekerasan dan aspek behaviour dalam konflik yang merupakan bagian dari upaya *peacemaking*. Sementara, *conflict settlement* lebih mengacu pada “*elite peacemaking*” dengan berbagai proses negosiasi ataupun mediasi yang dilakukan oleh elit aktor dalam konflik untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mengubah aspek *attitude* konflik. Sementara itu, *Conflict transformation* mencakup *structural* dan *cultural peacebuilding* (Ramsbotham, 1999: 11). Bentuk transformasi struktur ini dilakukan dengan *normalization* yang mengarah pada pembangunan secara ekonomi dan sosio-kultural wilayah konflik. Pada akhirnya, sebuah de-eskalasi konflik diharapkan dapat mencapai tahap rekonsiliasi, yaitu adanya perkembangan secara psikologis, yaitu penerimaan masing-masing pihak dalam konflik atas apa yang terjadi di masa lalu (Dudouet, 2006).



Sebuah konflik juga merupakan hasil interaksi sosial sehingga solidaritas memainkan peran penting di dalamnya sebagai motor mobilisasi kelompok yang menghasilkan kepercayaan diri dan antusiasme yang tinggi di dalam konflik (Collins, 2012). Solidaritas dalam konflik tercermin dalam kelompok-kelompok *ethnic-nationalist* yang menggunakan *sense of belonging* melalui ikatan etnis dalam perjuangannya (Evans & Newnham, 1998: 154). Faktor internal proses de-eskalasi dipengaruhi pula oleh karakteristik *protracted struggle* dalam konflik. Idealisme kelompok dapat mengalami tantangan dengan adanya faksi-faksi dalam kelompok, seperti faksi militan garis keras, faksi perdamaian, negosiator, dan de-eskalator (Colins, 2012: 17). Kegagalan strategi dalam sebuah kelompok militan dapat menjadi stimulus yang kuat bagi kelompok dalam konflik untuk mengubah strateginya menjadi lebih akomodatif (Kriesberg, 1998: 192).

Sumber daya dalam organisasi juga menjadi faktor pendorong terjadinya de-eskalasi konflik dari sisi internal. Penurunan intensitas dalam konflik dapat dilatarbelakangi oleh kelelahan sumber daya manusia di dalam konflik, maupun kegagalan saluran logistik kepada anggota faksi garis keras (Collins, 2012: 14). Faktor lainnya adalah adanya kemunduran di dalam solidaritas sehingga memengaruhi mobilisasi kelompok akibat keinginan untuk menghindari konflik dan tekanan dari pihak lawan terhadap organisasi internal aktor konflik. Selain itu, tensi yang dimunculkan akibat kekerasan yang selama ini terjadi akhirnya akan menghasilkan *asymetry*[[3]](#footnote-4) konflik yang akan menghasilkan kelelahan secara emosional. Randall Collins mengungkapkan bahwa solidaritas memiliki pola layaknya *fireworks rocket*, yang dimulai dengan fase kenaikan laju cepat (*rapid ascent*), masa puncak yang cukup lama (*lengthy plateau*) dan penurunan secara perlahan (*slow dissipation*) (Collins, 2012: 13).

Selain itu, proses de-eskalasi konflik dipengaruhi oleh aspek sosio-psikologikal dalam proses kognitif dan afektif individu (Kriesberg, 1998: 182). Menurut Kriesberg, proses kognitif dan afektif yang memengaruhi de-eskalasi konflik terjadi melalui perasaan empati dan simpati, yang dapat ditunjukkan dengan tulisan, bentuk kesenian dan pernyataan empati oleh masyarakat kulit putih di Afrika Selatan terkait dengan politik *apartheid* yang diberlakukan di negara tersebut (Kriesberg, 1998: 185).

Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor yang memengaruhi proses de-eskalasi adalah adanya interaksi yang bersifat resiprokal sehingga konflik lebih bersifat konstruktif. Faktor yang mendukung proses ini adalah adanya reaksi yang sama mengenai keinginan penghentian konflik, adanya pemahaman mengenai perjuangan masing-masing kelompok, dan keinginan menciptakan kesepakatan bersama (Kriesberg, 1998: 187). Adanya ikatan dalam kelompok-kelompok aktor konflik juga dapat membantu komunikasi dan fasilitasi de-eskalasi konflik. Interaksi dan komunikasi ini dapat berfungsi sebagai wadah mediasi, penyampaian informasi dan saran di antara pihak-pihak dalam konflik. Hal ini akan berdampak pada munculnya persamaan ekspektasi dan keberlanjutan hubungan anggota-anggota kelompok dalam konflik (Kriesberg, 1998: 189).

Ikatan etnis (*ethnic ties*) menjadi salah satu bentuk interaksi resiprokal yang memengaruhi proses de-eskalasi konflik. Kelompok etnis didefinisikan sebagai kelompok kolektif yang keanggotaannya ditentukan oleh keterikatan keturunan dan leluhur mereka sehingga ikatan ini akan memengaruhi perilaku mereka di dalam struktur sosio-ekonomi dan politik di kehidupan negara dan masyarakat (Saideman, 2002: 27). Tidak hanya ras, keterikatan ini juga termasuk di dalamnya keterikatan agama dan bahasa. Dukungan kekerabatan etnis ini juga mengacu pada aspek biologis, yaitu adanya kecenderungan sebuah kelompok etnis untuk memihak kelompok yang memiliki ikatan kekerabatan dengan alasan *struggle of resource* atau yang lebih dikenal dengan nepotisme etnis (Vanhannen, 1999).

Peran pihak perantara (intermediaries) menjadi faktor yang memengaruhi de-eskalasi konflik. Peran mereka dapat berupa mediator yang menetapkan sistem dan prosedur bagi pihak-pihak yang berkonflik, seperti melalui implementasi gencatan senjata. Selain itu, pihak ketiga dapat pula melakukan intervensi terhadap konflik yang didominasi dengan kekerasan. Selain itu, peran pihak ketiga juga dapat meliputi proses rekonsiliasi dan *peacebuilding* konflik, melalui bantuan dan pengajuan saran untuk kembali membangun wilayah konflik secara fisik dan kultural (Kriesberg, 1998: 190).

**Proses De-eskalasi Konflik ETA - Pemerintah Spanyol tahun 2006 – 2012**

Proses de-eskalasi konflik antara ETA dan Pemerintah Spanyol pada periode tahun 2006 hingga 2012 tidak berjalan secara linear dan melibatkan aktor yang cukup kompleks. Periode Maret 2006 hingga Juni 2007 menandai proses de-eskalasi pertama konflik ETA dan Pemerintah Spanyol. Penurunan tingkat kekerasan ETA dari tahun 2003 - 2006 ditindaklanjuti dengan adanya fase *conflict containment*, yaitu gencatan senjata permanen secara unilateral yang dinyatakan ETA pada Maret 2006. Pernyataan gencatan senjata dilakukan melalui sebuah pengumuman di sebuah stasiun radio Basque, Euskadi dan beberapa hari kemudian ETA merilis video pernyataan gencatan senjatanya melalui siaran televisi. Dalam video pernyatannya, ETA mengungkapkan keinginannya untuk mencapai perjuangannya hanya melalui cara-cara politik dan tidak ada lagi kekerasan serta teror. Para perwakilan ETA di dalam video tersebut menyatakan bahwa langkah-langkah demokratis berupa dialog damai merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik Basque (McLean, [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com), 2006).

Sementara itu, proses *conflict containment* tetap dilakukan dengan pembatasan kekerasan oleh ETA pasca gencatan senjata. Proses de-eskalasi konflik periode pertama ini hampir mencapai tahap *conflict settlement* dengan adanya negosiasi antara partai politik Spanyol, PSE, Partai Batasuna yang mewakili kelompok garis keras Basque dan BNP untuk mencapai *pre-agreement* pada bulan Juli 2006. Walaupun sempat menemui kemajuan, namun masing-masing pihak belum dapat menemukan sebuah formula kesepakatan. Ketidakpercayaan dari PSE pun terus menghambat proses dialog sehinga menghambat terciptanya formula kebijakan yang jelas terkait *self-determination* yang diajukan kelompok nasionalis Basque (Aiartza & Zabalo, 2010).

Pemerintah Spanyol yang tidak kunjung merespon upaya negosiasi ini dan adanya miskalkulasi kebijakan ETA membuat gencatan senjata ETA dipatahkan dengan pengeboman Bandara Barajas, Madrid pada 30 Desember 2006 (Aiartza & Zabalo, 2010 : 20). Pengeboman ini menewaskan dua warga negara Ekuador yang sedang berada di dalam mobil saat kejadian berlangsung. Selanjutnya, pada Januari 2007, Pemerintah Spanyol merespon peristiwa ini dengan mengumumkan bahwa strategi perdamaian yang akan dicapai adalah melalui dialog-dialog yang dilakukan antar-partai politik di Spanyol.[[4]](#footnote-5) Beberapa pertemuan yang diinisiasi oleh ETA selanjutnya tidak dapat memfasilitasi perbedaan kepentingan di antara Pemerintah Spanyol dan perwakilan poitik Basque sehingga pada Juni 2007, ETA mengumumkan penghentian gencatan senjatanya secara resmi melalui media Spanyol (Tilley, [www.theolivepress.es](http://www.theolivepress.es), 2007).

Periode setelah Juni 2007 merupakan masa-masa yang sulit bagi ETA untuk mengembalikan kepercayaan Pemerintah Spanyol. Pada periode 2007 hingga 2008 proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol mengalami stagnasi yang ditandai dengan penangkapan beberapa anggota penting ETA. Namun, dinamika pembatasan kekerasan, terutama oleh ETA, masih tetap berlangsung. Dalam masa itu juga, proses *confidence building* di antara partai politik Basque terus dilakukan dengan bantuan pihak internasional. Beberapa proposal perdamaian yang dikeluarkan dalam periode ini, antara lain “Clarifying the political phase and Strategy” (Oktober 2009), “Principles and Will of the Abertzale Left”(November 2009) di Altasaua-Venice yang menyatakan dukungan penuh kelompok *abertzale left[[5]](#footnote-6)* terhadap proses politik yang demokratis sehingga masyarakat Basque dapat memperoleh hak untuk menentukan masa depan mereka tanpa intimidasi dari pihak-pihak lainnya. Pada Februari 2010, “Principles and Will of the Abertzale Left” dituangkan ke dalam sebuah Resolusi “Zutik Euskal Herria” (Stand Up for Basque Country). Proposal ini menitikberatkan pada keinginan kelompok *abertzale left* untuk melakukan transformasi dari cara-cara kekerasan menuju proses demokratis dalam penyelesaian konflik Basque dan pentingnya peran gerakan *grass roots* dalam melindungi hak asasi masyarakat sipil Basque (Zabalo & Imaz, [www.c-r.org](http://www.c-r.org)). Dokumen ini sangat disambut baik oleh aktor-aktor internasional, yang ditunjukkan dengan adanya deklarasi bersama oleh Desmond Tutu, Mary Robinson, Frederick DeKlerk hingga the Nelson Mandela Foundation dan beberapa aktor mediator yang meminta ETA untuk mendeklarasikan gencatan senjata secara permanen dan Pemerintah Spanyol untuk memberikan respon yang sesuai (Aiartza & Zabalo, 2010: 46). Hal ini direspon ETA dengan pernyataan gencatan senjata ETA secara publik pada September 2010 hingga Oktober 2011 yang menunjukkan komitmen organisasi ini untuk menghentikan *direct violence* yang selama ini menjadi cirri khasnya. Tidak hanya itu, ETA juga berjanji akan menghentikan menarik pasukan bersenjatanya, hal ini pun dibuktikan dengan tidak adanya aksi kekerasan ETA hingga Desember 2012.

Proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Basque pada periode 2006 – 2012 berada pada fase *conflict containment* dengan berbagai upaya menuju *conflict settlement.* Beberapa kemajuan lain dalam proses de-eskalasi ini adalah adanya pengakuan dan permintaan maaf sejumlah pemimpin partai politik Basque terkait aksi-aksi kekerasan yang pernah dilakukan ETA. Pada sebuah wawancara di pertengahan tahun 2012, pimpinan Partai Batasuna, Arnaldo Otegi menyatakan penyesalannya dan permintaan maafnya terhadap keluarga dan seluruh korban dari aksi kekerasan ETA. Hasil wawancara ini kemudian disampaikan kepada beberapa partai politik Basque lainnya dan pemerintahan Basque ([www.transconflict.com](http://www.transconflict.com), 2012).

“The abertzale left has recognized and does recognize the pain that has been caused. And I want to go beyond that and, if in my position as spokesman, I could add my two cents to help ease the pain, suffering and humiliation of the families of the victims of ETA’s armed actions, I want to offer my most sincere apologies, accompanied by an ‘I am sorry,’ from the bottom of my heart.”([www.elpais.com](http://www.elpais.com), 2012).

Setelah deklarasi gencatan senjata tersebut dilakukan, belum ada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ETA. Pada bulan pertengahan hingga akhir 2012, upaya-upaya mencapai dialog damai antara ETA dan Pemerintah Spanyol memperlihatkan beberapa perkembangan, terutama dalam upaya rekonsiliasi internal masyarakat Basque. Pendidikan menjadi salah satu cara dalam rekonsiliasi internal masyarakat Basque melalui *plan of action* Basque Education Plan for Peace and Human Rights (2008 – 2011) pada tahun 2007. Hal ini direspon oleh sejumlah sekolah di Basque Autonomous Community dengan metode pembelajaran resolusi konflik dengan mendengarkan testimoni korban dan keluarga ETA bagi siswa usia remaja ([www.preventionaction.org](http://www.preventionaction.org), 2012). Sementara itu, dukungan dari masyarakat Basque di Prancis (Iparralde) terus dilakukan melalui pernyataan beberapa politisinya yang mendorong terciptanya negosiasi terbuka antara ETA dan Pemerintah Spanyol. Begitu pula dengan masyarakat Irlandia Utara yang membentuk Irish-Basque Solidarity Committee yang secara berkala menampilkan pertunjukan kultur Basque ([www.indymedia.com](http://www.indymedia.com), 2012).

**Menurunnya Elemen Solidaritas sebagai Faktor Internal Proses De-eskalasi Konflik**

Faktor internal proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol tahun 2006 – 2012 didasarkan bahwa sebuah konflik merupakan sebuah interaksi sosial yang melibatkan mobilisasi dan solidaritas sosial yang menghasilkan kepercayaan, energi emosional dan *membership* atas kelompok tertentu. Karakter *protracted struggle* dalam perjuangan ETA membuat idealisme dalam organisasi ETA pun mengalami tantangan dengan munculnya faksi-faksi militan garis keras dan moderat. Perjuangan untuk mewujudkan Basque Country yang hampir lebih dari lima dekade membuat adanya faksi-faksi di tubuh ETA yang turut menghadirkan perbedaan akan strategi kekerasan dan strategi politik untuk mencapai tujuan. Pada proses de-eskalasi konflik ETA – Pemerintah Spanyol tahun 2006 – 2012 ini, adanya faksi dalam ETA menghadirkan tantangan tersendiri untuk mencapai fase *conflict settlement*, yaitu pengeboman bandara Barajas yang merupakan hasil dari miskalkulasi kebijakan dan perbedaan pandangan antara faksi garis keras dan moderat dalam ETA (Ward & Larramendy, 2010). Sebelumnya, pada pertengahan 2005 ETA mengeluarkan enam anggotanya yang mencoba mengajak Pemerintah Spanyol untuk berdialog. Salah satu anggota tersebut adalah Francisco Mugica Garmendia yang menyatakan bahwa perjuangan militer ETA selama ini telah berlawanan dengan tujuan awal perjuangan kelompok ini ([www.expactica.com](http://www.expactica.com), 2005).

Ketidakpercayaan masyarakat Spanyol setelah pengeboman serta sikap skeptis Pemerintah Spanyol atas ajakan dialog damai ETA membuat kelompok *hardliner* memiliki pandangan berbeda atas cara-cara kekerasan yang selama ini mereka tempuh. Pada September 2010, Batasuna mengungkapkan keinginan untuk mengubah haluan cara-cara kekerasan ETA dan mengancam akan adanya perpecahan antara dua kelompok ini apabila kelompok garis keras terus pada pendiriannya. Hal ini disikapi ETA dengan menggelar pertemuan (*communiqué*) untuk membahas hal ini dan memanggil kembali para mediator internasional, seperti Desmond Tutu, James Hume dan Mary Robinson untuk membantu proses dialog damai ETA dan Pemerintah Spanyol ([www.zimbio.com](http://www.zimbio.com), 2010). Adanya tekanan politik terhadap kelompok garis keras membuat faksi-faksi dalam organisasi internal ETA pun menemui kata sepakat untuk mengakhiri cara-cara kekerasan yang selama ini telah dilakukan.

Adanya penguatan kebijakan anti-terorisme oleh Pemerintah Spanyol turut memengaruhi saluran-saluran logistik ETA, seperti ilegalisasi beberapa organisasi dan partai politik Basque. Implikasinya adalah semakin berkurangnya sumberdaya ETA, baik dari sisi finansial maupun sumberdaya manusia. Sejak tahun 1970an sumber dana aktivitas ETA berasal dari “*revolutionary tax*” yang merupakan pajak illegal dari perusahaan dan bisnis medium di wilayah Basque Country Hegoalde dan aksi-aksi kriminal, seperti perampokan bank, penculikan beberapa pengusaha hingga pemerasan (Solomon, [www.c-cft.org](http://www.c-cft.org)). Penculikan menjadi salah satu aksi ETA yang paling sering dilakukan, baik dengan tujuan politik maupun motif ekonomi. Namun, aksi penculikan dinilai sebagian besar aktivis ETA sebagai usaha yang beresiko dan bukanlah merupakan sumber dana yang stabil sehingga sejak tahun 1996 ETA sudah meninggalkan penculikan sebagai salah satu aktivitas sumber dananya. Selain itu, ilegalisasi Partai Batasuna pada tahun 2003 mengakibatkan penurunan sumber dana yang cukup signifikan bagi operasional kegiatan ETA (Sanchez-Cuenca, 2008: 13).

Khusus mengenai sumberdaya manusia, masalah usia menjadi salah satu faktor pemicu semakin berkurangnya dukungan terhadap organisasi ini. Ketika terbentuk pada tahun 1958, ETA memiliki lebih kurang 500 militan garis keras. Jumlah ini terus berkurang, yaitu sekitar 300-350 militan garis keras pada tahun 1978. Pada tahun 2008, Ignacio Sanchez-Cuenca mencatat bahwa jumlah aktivis garis keras ETA hanya sampai pada angka kurang dari seratus orang saja (Sanchez-Cuenca, 2008: 10). Faktor usia juga menjadi salah satu elemen penting dalam keberlangsungan organisasi ETA saat ini. Pada tahun 1970 hingga 1980an, hanya 9 persen dari para Etarra (pejuang ETA) yang berusia di bawah 20 tahun, sedangkan pada tahun 2005, hampir 60 persen rekruter Etarra berusia di bawah 20 tahun (Sanchez-Cuenca, 2008: 13).

Pemberlakuan sejumlah aturan hukum mengenai terorisme serta penangkapan sejumlah tokoh inti sejak akhir tahun 1990-an membuat ETA lahir sebagai organisasi yang didominasi generasi muda (remaja hingga usia 40 tahun) yang masih belum berpengalaman, baik dalam kemampuan militer, politik atau jaringan distribusi logistik. Penangkapan para tokoh garis keras yang memiliki pengaruh cukup besar dalam aktivitas kekerasan ETA semakin menurunkan intensitas konflik ETA, khususnya dengan Pemerintah Spanyol. Penangkapan beberapa pemimpin penting ETA terjadi mulai tahun 2008 hingga 2012 dan tercatat sebanyak 24 anggota ETA yang ditangkap di kawasan Spanyol dan Prancis ([www.bbc.uk](http://www.bbc.uk), 2012).

Melemahnya solidaritas etnis dan *sense of belonging* masyarakat Basque menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan konflik untuk mencapai Basque Country. Solidaritas masyarakat Basque terbentuk kuat pasca konflik dan tekanan pada rezim Franco, namun mengalami penurunan perlahan hingga saat ini. Melemahnya solidaritas ini dilatarbelakangi perjuangan yang telah berlangsung cukup lama dan tingkat hibriditas kultur yang cukup tinggi dalam wilayah Basque Country (Beck, 2006). Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Randall Collins, faktor solidaritas dan saluran logistik dapat menjadi faktor yang saling berkaitan. Melemahnya solidaritas masyarakat Basque memengaruhi saluran logistik ETA, terutama dalam proses rekrutmen para Etarra. Implikasinya adalah sebagian besar Etarra garis keras yang terdiri atas generasi muda yang minim pengalaman sehingga turut memperlemah strategi kekerasannya.

Melemahnya solidaritas dan *sense of belonging* terhadap identitas Basque, khususnya bahasa, juga terjadi di dalam para pejuang ETA (Etarra). Dalam tiga dekade yang lalu, hampir dua pertiga Etarra berbahasa Euskara dan 60 persen di antara mereka memiliki nama keluarga Basque. Namun, pada tahun 2005, hanya 10 persen di antara Etarra yang benar-benar memiliki darah Basque dalam tubuhnya. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan lokasi asal para pejuang ini, yaitu pada tahun 1970an sebagian besar Etarra berasal dari wilayah kecil Basque Country, sementara pada tahun 2005 para Etarra lahir di kawasan kota dan pusat metropolitan yang kurang kental akan atribut primordial kultur Basque (Alexieva, 2006: 55).

Selain itu, adanya simpati dari elemen masyarakat dan politisi Basque turut mendorong proses de-eskalasi konflik antara ETA dan Pemerintah Spanyol, terutama dalam menciptakan rekonsiliasi internal Basque. Masyarakat Basque terbagi atas mereka yang menginginkan kemerdekaan dari Spanyol dan yang menginginkan perluasan otonomi dengan tetap berada di bawah sistem federalisme Spanyol. Dalam aspek kognitif, sebagian besar masyarakat Basque menolak aktivitas kekerasan ETA dan menginginkan proses politik sebagai upaya penyelesaian konflik (Alexieva, 2006). Perubahan secara sosio-psikologis dalam masyarakat Basque yang cukup signifikan juga telah sampai pada perubahan aspek konatif masyarakat, yaitu mulai diadakannya berbagai pendidikan dan pertemuan antara keluarga dan korban ETA dengan sejumlah tahanan poltik ETA. Proses ini mengisyaratkan mulai adanya pengakuan masyarakat Basque atas konflik dan kekerasan yang pernah terjadi dan upaya untuk membina relasi yang baik dengan para keluarga dan korban ETA. Proses ini merupakan bagian dari rekonsiliasi internal masyarakat Basque sebagai bukti penolakannya terhadap aksi kekerasan ETA.

**Faktor Eksternal Proses De-eskalasi Konflik ETA – Pemerintah Spanyol tahun 2006 – 2012**

Dukungan kekerabatan etnis sebagai faktor eksternal proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol diperlihatkan dengan adanya dukungan antarkelompok ini untuk mempertahankan identitasnya, termasuk bahasa. Otonomi khusus bagi wilayah Hegoalde membuat bahasa Euskara lebih berkembang pesat di wilayah ini. Kerjasama antarwilayah perbatasan, intervensi dan pendanaan pengembangan kultur di Iparralde oleh masyarakat Hegoalde menjadi dukungan kekerabatan kelompok ini untuk mempertahankan identitasnya. Perbedaan persepsi dalam nasionalisme dan militansi membuat gerakan akar rumput menjadi lebih dominan di Iparralde (Beck, 2006). Selain itu, dominasi generasi muda membuat gagasan-gagasan nasionalisme yang digulirkan lebih bersifat non-kekerasan dan berimplikasi pada minimnya tensi dengan Pemerintah Prancis. Oleh karena itu, proses pencapaian jalan damai dan gencatan senjata oleh ETA, khususnya pada periode 2010-2012 sangat didukung oleh masyarakat Iparralde, baik politisi maupun pengungsi politik ETA ([www.basquepeaceprocess.com](http://www.basquepeaceprocess.com), 2012). Interaksi resiprokal antara masyarakat Hegoalde dan Iparralde menghadirkan persamaan ekspektasi atas kekerasan yang tidak lagi relevan sebagai strategi perjuangan kelompok nasionalis Hegoalde. Dalam hal ini, dukungan kekerabatan etnis Basque di Iparralde, baik yang ditunjukkan dengan dukungan para politisi maupun para pengungsi ETA berperan sebagai wadah mediasi sekaligus informasi yang memberikan dukungan terhadap proses de-eskalasi konflik.

Sementara itu, peran Uni Eropa dalam proses de-eskalasi konflik antara ETA menitikberatkan pada penguatan aspek eksternal konflik, yaitu dengan berbagai konferensi dan deklarasi yang digagas untuk mendorong proses dialog dan rekonsiliasi antara ETA dan Pemerintah Spanyol dan Prancis. Status *state-centric*[[6]](#footnote-7) dalam Uni Eropa membuat organisasi ini sulit untuk mengakui adanya *sub-state autonomy*[[7]](#footnote-8) di antara negara-negara anggotanya, seperti yang tergambar dalam cita-cita Basque Country. Oleh karena itu, fokus utama Uni Eropa dalam konflik Basque adalah dukungan terhadap proses perdamaian konflik ini yang menitikberatkan pada isu hak asasi manusia, demokrasi dan keterlibatan *multi-level governance[[8]](#footnote-9)* di dalamnya (Wars & Larramendy, 2005). Dalam posisinya sebagai organisasi tertinggi regional, intervensi dalam konflik masih sedikit dilakukan oleh Uni Eropa dalam proses de-eskalasi konflik antara ETA dan Pemerintah Spanyol. Uni Eropa lebih banyak berperan sebagai mediator konflik dengan memfasilitasi berbagai konferensi dan dialog yang menghasilkan deklarasi perdamaian. Hal ini juga didukung oleh komunitas dan sejumlah tokoh internasional, seperti International Verification Commission dan Basque Friendship Group yang berusaha memperkuat komitmen internal ETA terhadap penghentian aksi kekerasan untuk dapat memperoleh respon dari Pemerintah Spanyol.

Faktor eksternal lainnya dalam proses de-eskalasi konflik ini adalah adanya solidaritas dari aktor-aktor Irlandia Utara yang sekaligus berperan sebagai mediator konflik, baik secara internal dengan perwakilan partai politik Basque, maupun keterlibatannya dalam perumusan implementasi gencatan senjata ETA. Adanya pengalaman serupa antara IRA dan Pemerintah Irlandia Utara membuat aktor-aktor Irlandia Utara memiliki peran penting dalam proses de-eskalasi antara ETA dan Pemerintah Spanyol. Secara umum, peran aktor-aktor Irlandia Utara dalam konflik Basque terlihat pada kedekatan ETA dengan IRA, keterlibatan partai Sinn Fein dan Gerry Adams dalam proses resolusi konflik, dan adanya forum solidaritas Irish-Basque Solidarity Committees yang mencari dukungan publik dalam proses perdamaian konflik (Ward & Larramendy, 2010: 13). Persamaan dalam pencarian legitimasi perjuangan kelompok *sub-state* membuat sebagian aktor Irlandia Utara meyakini bahwa masyarakat Basque Country juga berhak untuk memperoleh *self determination* untuk menentukan masa depannya.

Sejak awal terbentuknya, IRA dan ETA memiliki solidaritas kelompok yang dibangun atas kesamaan perjuangan mereka sebagai kelompok nasionalis yang melawan pemerintahan *modern-democratic* (Ward & Larramendy, 2010: 14). Solidaritas antara IRA dan ETA terlihat pada interaksi dan pertukaran logistik serta strategi di antara keduanya. Aktor Irlandia Utara lain yang banyak berperan dalam konflik Basque adalah Partai Sinn Fein dan pemimpinnya, Gerry Adams. Menyikapi gencatan senjata ETA pada Maret 2006, Gerry Adams merupakan salah satu tokoh internasional yang berusaha mendorong terciptanya proses demokratis dalam penyelesaian konflik bersama dengan Francesco Cossiga, Mario Soares, dan Adolfo Maria Perz (Aiartza & Zabalo, 2010: 39). Adams dan Sinn Fein juga secara tegas memberikan dukungannya terhadap legalisasi Partai Batasuna dan adanya hak *self determination* bagi masyarakat Basque. Dua bulan pasca gencatan senjata tersebut Partai Sinn Fein menulis surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Jose Louis Zapatero agar segera menyambut upaya gencatan senjata ETA. Pada periode gencatan senjata tersebut, Gerry Adams tercatat beberapa kali mengunjungi Basque Country untuk melakukan konsolidasi dengan Batasuna dan PNV-EAJ (Ward & Larramendy, 2010: 14). Adams juga kemudian merupakan salah satu pihak yang aktif menghimbau Pemerintah Spanyol dan Prancis untuk merespon gencatan senjata ETA sepanjang tahun 2010 hingga 2012.

Selain Gerry Adams dan Partai Sinn Fein, Irish-Basque Solidarity Committee juga merupakan salah satu aktor Irlandia Utara yang memiliki peran dalam proses de-eskalasi konflik Basque, khususnya dalam aspek kultural. Kelompok ini mendeskripsikan mereka sebagai organisasi yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak *self determination* masyarakat Basque. Keterlibatan kelompok ini ditunjukkan dengan pembagian material mengenai kultur Basque, *fund raising*, hingga meluncurkan *website* yang berisi testimoni masyarakat Dublin dan Belfast mengenai konflik Basque. Selain itu, kelompok ini juga secara aktif menghadirkan forum diskusi terbuka bagi publik yang diisi oleh pemateri dari Basque Country dan disertai dengan festival dengan seni khas masyarakat Basque ([www.indymedia.com](http://www.indymedia.com)).

**Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses de-eskalasi konflik antara ETA dan Pemerintah Spanyol pada tahun 2006 hingga 2012 merupakan sebuah proses yang berjalan secara tidak linear. Konflik antara ETA dan Pemerintah Spanyol merupakan salah satu konflik kelompok etnis nasionalis paling klasik di Eropa. Proses dan upaya untuk menempuh jalan damai yang dilakukan ETA beberapa dekade ini menjadi fenomena yang menarik dalam konflik kelompok etnis dengan negara. ETA menjadi inisiator proses de-eskalasi konflik ini melalui pernyataan gencatan senjata secara unilateral oleh ETA pada Maret 2006. Namun, proses konsiliasi dengan Pemerintah Spanyol mengalami banyak tantangan. Dalam periode 2006 hingga 2012, penulis mengelompokkan periode Maret 2006 hingga Juni 2007 sebagai periode pertama dan periode pasca Juni 2007 hingga Desember 2012 sebagai periode kedua proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol.

Teori “*the hourglass of conflict resolution*” mendukung argumen penulis bahwa proses de-eskalasi konflik disertai oleh perluasan upaya-upaya politik. Dalam hal ini, proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol pada tahun 2006 hingga 2012 masih berada dalam tahapan *conflict containment* menuju tahap *conflict settlement*. Proses de-eskalasi pada periode pertama berjalan dengan adanya tekanan internal dan dukungan internasional kepada ETA untuk melakukan penghentian penggunaan senjata dan kekerasan dan memulai menempuh jalur negosiasi damai dengan Pemerintah Spanyol. Beberapa negosiasi dilakukan untuk merumuskan *pre-agreement* antara partai politik Spanyol dan Basque guna mencapai proses menuju *conflict settlement*. Namun, adanya beberapa faksi dan ketidaksepakatan di dalam tubuh internal ETA dan perdebatan internal dalam Pemerintahan Spanyol membuat pada Desember 2006 faksi militan ETA melakukan pengeboman Bandara Barajas, Madrid yang menewaskan dua warga negara Ekuador.

Proses de-eskalasi pun mengalami tantangan dengan adanya peristiwa ini. Pemerintah Spanyol langsung menunjukkan ketidapercayaannya pada ETA, sementara ETA berusaha mengevaluasi faksi-faksi yang ada dalam tubuh internalnya. Penghentian gencatan senjata pada Juni 2007 membuat proses de-eskalasi pun dimulai lagi dengan tahapan *conflict containment* yang terlihat dengan melemahnya organisasi internal ETA dan faksi moderat yang lebih dominan dalam tubuh ETA. Melemahnya logistik dan sumberdaya ETA menjadi latar belakang semakin kuatnya keinginan organisasi ini untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Selain itu, melemahnya solidaritas dan *sense of belonging* masyarakat Basque akibat hibriditas yang cukup tinggi membuat hanya sedikit yang peduli akan perjuangan kelompok nasionalis Basque untuk mencapai Euskal Herria. Hal ini juga didukung dengan perubahan sosio psikologis dalam masyarakat Basque dan simpati mereka akan korban ETA sehingga jalan negosiasi lebih banyak dipilih untuk menyelesaikan konflik ETA dan Pemerintah Spanyol.

Faktor-faktor internal dan eksternal dalam proses de-eskalasi menghadirkan dinamika-dinamika tersendiri dalam aspek kekerasan dan elemen konflik. Munculnya faksi serta berkurangnya sumber daya serta saluran logistik ETA memperlemah organisasi internal kelompok ini sekaligus menekan *behaviour* konflik untuk mengurangi *direct violence*. Sementara itu, melemahnya solidaritas serta perubahan sosio psikologis masyarakat Basque menghadirkan adanya upaya transformasi attitude pihak-pihak antara masyarakat Basque, ETA, dan keluarga serta korban ETA. Dari aspek faktor eksternal, keterlibatan Uni Eropa, komunitas internasional dan aktor-aktor Irlandia Utara dalam proses de-eskalasi konflik ETA dan Pemerintah Spanyol tahun 2006 – 2012 sebagian besar berperan sebagai mediator konflik yang menghubungkan partai politik dan elemen masyarakat Basque dengan para tokoh mediator internasional demi mencapai dialog dengan Pemerintah Spanyol. Melalui *power*-nya dalam skala regional, Uni Eropa juga berperan dalam menekan penghentian direct violence oleh ETA. Kehadiran Uni Eropa dan komunitas internasional menjadi faktor eksternal yang melakukan transformasi dalam aspek *behaviour* dan *attitude* konflik dari sisi eksternal ETA dan Pemerintah Spanyol, sementara dukungan kekerabatan Iparralde dan peran aktor-aktor Irlandia Utara lebih berperan dalam menekan kedua aspek tersebut dalam konteks organisasi internal ETA dan masyarakat Basque itu sendiri.

**Referensi:**

**Buku:**

Graham Evans & Jeffrey Newnham, *Dictionary of International Relations*, (London : Penguin Reference, 1998)

Hutchinson, John & Anthony Smith, *Ethnicity* (New York : Oxford Publisher, 1996)

Kriesberg, Louis, *Constructive Conflicts : From Escalation to Resolution* (Oxford : Rowman & Littlefield Publishers. Inc, 1998)

Miller, Christopher, *A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies, Second Edition* (San Jose, Costa Rica: University for Peace, 2005), 30

Ogley, Roderick, “Conflict Theory*” Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, Volume 2,* ed.Lester Kurtz, 401-412 (Academic Press, 1999)

Snodderly, Dan (ed.), Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding (Washington DC: United States Institutes of Peace, 2011)

**Jurnal Online:**

Aiartza, Urko & Julen Zabalo, *“*The Basque Country : The Long Walk to a Democratic Scenario”, *Berghof Transitions Series No. 7* (2010): 1-76. <http://www.berghof-conflictresearch.org> (diakses tanggal 15 Desember 2011)

Alexieva, Assia, “Targeting the Roots and Goals of ETA: A Counter-Terrorist Strategy to Consider?” *Journal of IPS* (Volume5 : Spring 2006), 53-65. <http://irps.ucsd.edu/assets/004/5365.pdf> (diakses tanggal 8 Desember 2012)

Bray, Zoe, “Basque Militant Youth in France : New Experience of Ethnonational Identity in the European Context*” Nationalism and Ethnic Conflicts* 12 (2006) : 533 – 555. <http://cadmus.eui.eu/handle/1814/15216>(diakses pada 17 September 2012)

Collins, Randall, “C-Escalation and D-Escalation : A Theory of the Time-Dynamics Conflict” dalam *American Sociological Review* 77 (1) (January 2012) : 1-20, <http://www.asanet.org/images/journals/docs/pdf/asr/Feb12ASRFeature.pdf>, (diakses tanggal 2 November 2012)

Dudouet, Veronique, 2006, “Transitions from Violence to Peace : Revisiting Analysis and Intervention in Conflict Transformation” *Berghof Report*, Nr. 15(November 2006): 6-22, <http://www.berghof-conflictresearch.org/documents/publications/br15e.pdf> (diakses tanggal 2 November 2012)

Harguindeguy, Jean Baptiste & Xabier Itcaina,”Towards a Consistent Language Policy for the French Basque Country? Actor, Processes and Outcomes*” Working Paper Universidad Autonoma de Madrid* (122/2011): 1-17. <http://www.portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATION/working_papers/Harguindegu_y_Itcaina_2011.pdf> (diakses tanggal 25 April 2012)

Idoiaga, Gorka Espiau, “The Basque Conflict : New Ideas and Prospects for Peace”, *United States Institutes of Peace, Special Report* (161, April 2006), <http://www.usip.org/files/resources/sr161.pdf> (diakses pada 15 Desember 2011)

Jacob, James, “The Future of Basque Nationalism in Iparralde*”BIBLID* 0212-7016 44:1 (1999) : 69-88.<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/44/44069088.pdf> (diakses pada 18September 2012)

Lerche, Charles, “Peace Building Through Reconciliation”, *International Jurnal of Peace Studies, Vol. 5 No. 2. 2000, Autum Winter*

Ramsbotham, Oliver, “Introduction to Conflict Resolution : Concepts and Definitions”, *Contemporary Conflict Resolution, 3rd Edition* (1999): 3 -34, <http://www.polity.co.uk/ccr/contents/chapters/1.pdf> (diakses tanggal 2 November 2012)

Saideman, Stephen, “Discrimination in International Relations : Analyzing External Support for Ethnic Groups”, *Journal of Peace Research* 2002; 39; 27 (2002) : 27-48, <http://jpr.sagepub.com/content/39/1/27.abstract#BIBL> (diakses tanggal 25 April 2012)

Sanchez-Cuenca, Ignacio, “The Persistence of Nationalist Terrorism : The Case of ETA*”, Violent Non-State Actors in Contemporary Politics*, ed. Kledja Mulaj (Madrid : Juan March Institute, 2008) : 1-31. <http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv/pdf/eta%20(kledja).pdf>, (diakses tanggal 18 September 2012)

Solomon, John, “Exposing the ETA Financial Network”, *World Check Terrorism and Insurgence Research Unit (*n.d) <http://www.c-cft.org/publication/pdf/ExposingtheETAFinancialNetwork.pdf> (diakses tanggal 8 Desember 2012)

Vanhanen, Tatu, “Domestic Ethnic Conflict and Ethnic Nepotism : A Comparative Analysis*”Journal of Peace Research* (1999) : 36 -55, [www.jpr.sagepub.com/content/36/1/55](http://www.jpr.sagepub.com/content/36/1/55) (diakses tanggal 2 Mei 2012)

Ward, Lacey Mae & Damien Larramendy, “Basque Conflict Map”, *Centre for Peace and Conflic Studies University of St. Andrews*, (July 2010). <http://www.st-andrews.ac.uk/intrel/media/Basque%20Country%20final%20draft.Pdf> , (diakses tanggal 25 November 2012)

Zabalo, Julen & Oier Imaz, “The EU and the Basque Conflict: Opportunities for Engagement?”, *Conciliation Resources*, <http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/Accord%2022_9The%20EU%20and%20the%20Basque%20conflict_2011_ENG.pdf> (diakses tanggal 2 Januari 2013)

**Sumber Internet Lainnya:**

Anonim, “Basque Ceasefire statement: full text”, *The Guardian*, 20 Oktober 2011, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/20/basque-ceasefire-statement-full-text>, (diakses 24 Desember 2012)

Anonim, “Batasuna leader makes apology to ETA victims”, El Pais, 16 September 2012, <http://elpais.com/elpais/2012/09/16/inenglish/1347822782_636405.html> (diakses tanggal 2 Januari 2013)

Anonim, “Gerry Adams welcomes ETA ceasefire Announcement”, 21 Oktober 2011, *BBC News*, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-15399083> (diakses tanggal 26 Desember 2012)

Anonim, “Timeline : ETA Campaign”, *BBC News Europe*, 20 Oktober 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11181982> (diakses tanggal 27 Desember 2011)

Anonim, “Gerry Adams welcomes ETA ceasefire Announcement”, 21 Oktober 2011, *BBC News*, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-15399083> (diakses tanggal 26 Desember 2012)

CNN Wire Staff, “Spain minister warns ETA's end to violence is not end of story*”*, *CNN Online,* 21 Oktober 2011, <http://edition.cnn.com/2011/10/21/world/europe/spain-eta/index.html> (diakses tanggal 27 Desember 2011)

Tomlison, Simon, “Tony Blair’s Grand Reaction to ETA ceasefire”, *Daily Mail UK*, 21 Oktober 2011, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051883/I-stand-ready-help-way-I-Tony-Blairs-grand-reaction-ETA-ceasefire.html> (diakses tanggal 2 Januari 2013)

Tremlett, Giles, “Sinn Fein heavily involved in push for ETA ceasefire, says Gerry Adams”, *The Guardian*, 6 Oktober 2010, <http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/06/sinn-fein-eta-ceasefire-gerry-adams> (diakses tanggal 21 November 2012)

Zurutuza, Karlos, “Spain: ETA Announces End to Europe's Last Armed Conflict”, *Global Issues*, 20 Oktober 2011, <http://www.globalissues.org/news/2011/10/20/11605> (diakses tanggal 15 Desember 2011)

Lokari, “Resolving the Basque Conflict”, *Trans Conflict*, <http://www.transconflict.com/2012/10/resolving-the-basque-conflict-080/> (diakses tanggal 30 Desember 2012)

“Basque Spain schoold builds trust in peace”, *Prevention Action*, <http://www.preventionaction.org/what-works/basque-spain-schools-build-trust-peace/5240> (diakses 9 Desember 2012)

“Basque Spain schoold builds trust in peace”, *Prevention Action*, <http://www.preventionaction.org/what-works/basque-spain-schools-build-trust-peace/5240>, (diakses 9 Desember 2012)

“Dublin Basque Festival presents Basque current event and culture”, 22 September 2011, *Indymedia Ireland,* <http://www.indymedia.ie/article/100578?userlanguage=en&save_prefs=true> (diakses 26 Desember 2012)

“Cadena ser Interview with Arnaldo Otegi”, *Arnaldo Otegi Online*, <http://www.arnaldotegi.com/?p=497&lang=en> (diakses tanggal 28 Desember 2011)

“Guernica Autonomy Statute”, *Euskadi*, <http://www9.euskadi.net/autogobierno/estatu_com_i.htm> (diakses 4 Januari 2013)

“Release Arnaldo Otegi”, *Sinn Fein*, <http://www.sinnfein.ie/contents/20910> (diakses tanggal 26 Desember 2012)

“The Basque Country”, *MIDAS Website*,

[www.midaspress.org/generalinformationbasquecountry.pdf](http://www.midaspress.org/generalinformationbasquecountry.pdf) (diakses pada 4 Juli 2012)

“The International Verification Commission’s (IVC) Report”, *International Verification Commission,* <http://www.ivcom.org/en/documents/document/fecha/2012/01/26/informe-de-la-comision-internacional-de-verificacion-civ/> (diakses tanggal 1 Januari 2013)

“ETA Hardliners expel six member who wanted peace”, Expactica Website, 11 Juli 2005, <http://www.expatica.com/es/news/local_news/eta-hardliners-expel-six-members-who-wanted-peace--21819.html> (diakses 8 November 2012)

“ETA hardliners warns of IRA-type split within ETA”, *Zimbio*, 20 September 2010, <http://www.zimbio.com/AFP+News/articles/HqKh6KPQvsT/Basque+separatist+warns+IRA+type+split+within> (diakses tanggal 8 November 2012)

1. *Self determination* merupakan hak sebuah masyarakat untuk menentukan status politiknya, yang dapat terdiri atas opsi kemerdekaan penuh, otonomi yang lebih atau pengakuan atas identitas bahasa dan agama di dalam sebuah negara (Snodderly, ed., 2011: 47) [↑](#footnote-ref-2)
2. Gencatan senjata (*ceasefire*) merupakan proses penghentian penggunaan senjata yang ditujukan guna mendinginkan konflik yang sedang terjadi, yang sering disebut dengan perjanjian gencatan permusuhan (*cessation of hostilities agreement*). Selain itu, gencatan senjata juga dapat bersifat lebih formal dengan mengelaborasi aturan-aturan; yang termasuk di dalamnya monitoring pihak eksternal dan sering dipahami sebagai penyelesaian konflik secara negosiasi. (glossary.usip.org) [↑](#footnote-ref-3)
3. *Asymmetry* atau *asymmetric conflicts* merupakan konflik yang terjadi di antaradua pihak dengan kekuatan berbeda, seperti antara kelompok minoritas dan mayoritas dan antara pemerintah dengan kelompok pemberontak (Ramsbotham, 23) [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Abertzale left* merupakan kelompok nasionalis Basque yang beraliran “kiri”, yaitu sosialis. Kelompok ini mendominasi politik Basque dan aktif menyuarakan keinginan self-determination bagi masyarakat Basque. Partai Batasuna merupakan bagian dari kelompok ini (Aiartza & Zabalo, 2010) [↑](#footnote-ref-6)
6. *State-centric* merupakan pendekatan hubungan internasional yang menekankan negara sebagai aktor otonom dengan berpegang pada prinsip territorial (Evans & Graham, 1998: 515) [↑](#footnote-ref-7)
7. *Autonomy* diartikan sebagai adanya pemberian sebagian kedaulatan pemerintah negara terhadap entitas tertentu (Evans & Newnham, 1998: 40). *Sub state autonomy* kemudian dimaknai sebagai pemberian otonomi kepada aktor-aktor sub-negara, termasuk kelompok etnis. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Multi-level governance* merupakan salah satu karakter Uni Eropa yang menitikberatkan pada difusi otoritas politik melalui kerjasama dan pendekatan dengan aktor-aktor privat (cor.europa.eu) [↑](#footnote-ref-9)